



Analisis perkembangan wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020

AZIZ KURNIAWAN^{1*}, CANTIKA LIVIONA¹, MUFLIHATUN NAHRIYAH¹, NIKO ABDILLAH¹, OKTA LIAN ATIKAH¹, RISANTI DELPHIA¹, YUDI NUGRAHA SAKTI¹

¹ Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 16424, Indonesia

*Korespondensi: niko.abdillah@gmail.com

Diterima: 15 Februari, 2024

Disetujui: 29 Februari, 2024

ABSTRAK

Latar Belakang: Kabupaten dan Kota Bekasi adalah bagian wilayah Jabodetabek-Punjur yang mengalami perkembangan pesat dalam periode tahun 2000 hingga tahun 2023. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejarah perkembangan fisik, kependudukan, permasalahan lingkungan hidup kawasan perkotaan di Kabupaten dan Kota Bekasi, serta menganalisis muatan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2020 terkait Lingkungan Hidup. **Metode:** Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten dan Kota Bekasi, menganalisis muatan Perpres No. 60 Tahun 2020 terkait Lingkungan Hidup dan menyusun konsep integrasi muatan kebijakan tersebut terkait lingkungan hidup ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi melalui studi literatur. **Temuan:** Hasil analisis spasial menunjukkan implementasi Perpres No. 60 tahun 2020 terhadap perkembangan wilayah perkotaan Bekasi membutuhkan sinergi antara kawasan lindung, kawasan budidaya, serta sistem pusat permukiman, termasuk kawasan inti kota, perkotaan sekitarnya, dan kawasan pengembangan berorientasi transit. **Kesimpulan:** Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung pengendalian kerusakan dan pengurangan pencemaran lingkungan hidup, juga mendorong pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

KATA KUNCI: Kabupaten Bekasi; Kota Bekasi; perkembangan wilayah; Perpres Nomor 60 Tahun 2020; pertumbuhan penduduk.

ABSTRACT

Background: Bekasi Regency and City are part of the Jabodetabek-Punjur region which experienced rapid development in the period 2000 to 2023. The aim of this research is to analyze the history of physical development, population, environmental problems of urban areas in Bekasi Regency and City, as well as analyze the content Presidential Regulation no. 60 of 2020 related to the environment. **Methods:** Qualitative methods are used to analyze environmental problems in Bekasi Regency and City, analyzing the contents of Presidential Decree No. 60 of 2020 related to the environment and developing a concept for integrating the content of these policies related to the environment into the Bekasi Regency and City Spatial Planning Plan through literature study. **Findings:** The results of spatial analysis show that the implementation of Presidential Decree no. 60 of 2020 on the development of the Bekasi urban area requires synergy between protected areas, cultivation areas, and residential center systems, including the city core area, surrounding urban areas, and transit-oriented development areas. **Conclusion:** The availability of adequate facilities and infrastructure will support damage control and reduce environmental pollution, as well as encourage sustainable regional development.

KEYWORDS: Bekasi City; Bekasi Regency; Presidential Decree Number 60 of 2020; population growth; regional development.

Cara Pengutipan:

Kurniawan et al. (2024). Analisis perkembangan wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020. *Spatial Review for Sustainable Development*, 1(1), 44-57.
<https://doi.org/10.61511/srsd.v1i1.2024.715>

Copyright: © 2024 dari Penulis. Dikirim untuk kemungkinan publikasi akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan dari the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



1. Pendahuluan

Wilayah dapat diartikan sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang memiliki keterkaitan, ketergantungan dan saling berinteraksi satu sama lain serta tidak dapat dipisahkan (Rustiadi et al., 2011). Wilayah metropolitan Jabodetabek mengalami fenomena urban expansion atau peningkatan kawasan terbangun secara cepat yang disebabkan oleh proses urbanisasi dan suburbanisasi. Fenomena ekspansi ini ditandai oleh peningkatan kawasan terbangun yang menyebar keluar dari pusat kota ke pinggiran kota hingga menyebabkan peningkatan perkembangan ekonomi dan aktivitas perkotaan (Pravitasari et al., 2015).

Perkembangan suatu kota ditandai dengan perubahan dari aspek-aspek kehidupan dan penghidupan kota tersebut, dari tidak ada menjadi ada, dari sedikit menjadi terbatas, dari kecil menjadi besar, dari ketersediaan lahan yang luas menjadi terbatas, dari penggunaan ruang yang sedikit menjadi luas (Widyaningsih, 2001). Adanya aktivitas masyarakat dan jumlah penduduk yang bertambah di suatu wilayah akan menyebabkan bertambahnya keperluan akan ruang yang diperkirakan akan mengurangi luas lahan pertanian (Wicaksono, 2011). Aktivitas masyarakat di perkotaan dapat mendorong peningkatan penggunaan tanah yang berpengaruh terhadap perubahan tata ruang wilayah. Akibat yang ditimbulkan oleh perkembangan kota adanya kecenderungan pergeseran fungsi-fungsi kota ke daerah pinggiran kota (urban fringe) yang disebut dengan proses perluasan wilayah perkotaan ke arah luar (Nechyba et al, 2004).

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kabupaten di wilayah Jabodetabek yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Alfarizi et al., 2015), Kabupaten Bekasi telah mengalami pertumbuhan dari tahun 2005 hingga tahun 2015, dilihat dari adanya peningkatan jumlah pemukiman dan area industri di Kabupaten Bekasi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Bekasi mengalami peningkatan dari 2.453.328 pada tahun 2011 menjadi 3.013.851 pada tahun 2019. Selain itu, didapati adanya jumlah penduduk yang tinggi pada beberapa kecamatan di Bekasi seperti pada Kecamatan Tambun dan Kecamatan Tambun Selatan yang mempunyai jumlah penduduk masing-masing sebesar 431.038 pada tahun 2020. Hal ini dapat berdampak pada munculnya permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Bekasi mengalami pertumbuhan yang cukup pesat selama beberapa tahun terakhir. Namun di samping itu, terdapat beberapa permasalahan lingkungan hidup yang muncul akibatnya meningkatnya aktivitas manusia di wilayah tersebut. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan kejadian banjir yang disebabkan Kabupaten Bekasi yang berada di daerah hilir sehingga meningkatkan potensi banjir akibat luapan sungai. Selain itu, meningkatnya area perindustrian di Kabupaten Bekasi mendorong peningkatan pencemaran limbah industri di lingkungan perairan. Permasalahan lain yang timbul adalah menurunnya kualitas udara akibat polusi kendaraan dan bahan bakar industri. Hal ini mungkin juga diakibatkan oleh berkurangnya persentase tutupan lahan di Kabupaten Bekasi, di mana saat ini wilayah Kabupaten banyak didominasi oleh pemukiman dan area industri. Pertumbuhan wilayah di Kabupaten Bekasi perlu disesuaikan dengan daya tampung dan daya dukung dari kemampuan lingkungan di wilayah tersebut.

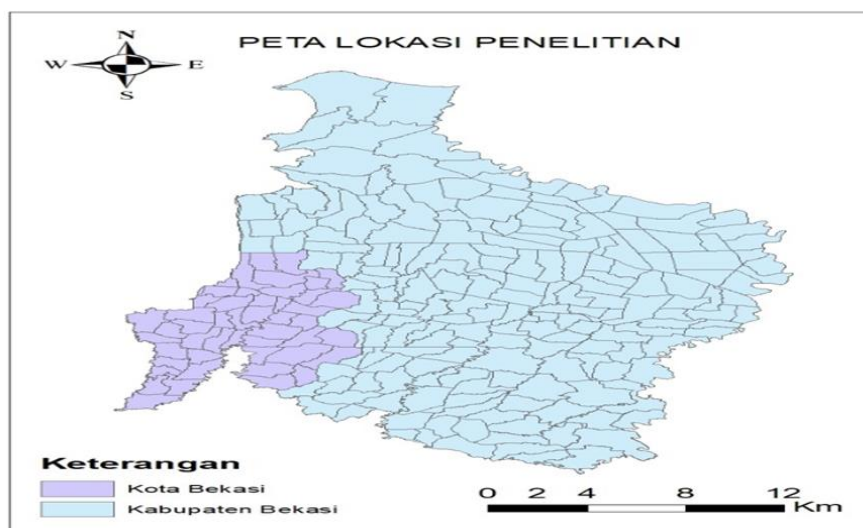
Dalam suatu kota, kondisi penduduk secara sosial maupun ekonomi sangat terkait erat dengan penataan ruang kota, pengelolaan lingkungan, dan sumber daya alam yang ada (Maya, 2019). Perencanaan tata ruang wilayah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Analisis daya dukung dan daya tampung wilayah diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang diperlukan untuk manusia, namun di samping itu tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dalam merencanakan tata ruang wilayah perkotaan perlu memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup. Strategi tata ruang wilayah perkotaan Jabodetabek-Punjur telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 yang berisi muatan mengenai; (1) Peran dan fungsi Rencana Tata

Ruang serta cakupan Kawasan Jabodetabek-Punjur; (2) Tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; (3) Rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, arahan pemanfaatan Ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; (4) Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; dan (5) Peran Masyarakat di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam pada suatu wilayah perlu disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung pada suatu wilayah. Untuk itu, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai tata kelola tata ruang, pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bekasi sehingga dapat disesuaikan dengan daya tampung dan daya dukung di wilayah Kabupaten Bekasi untuk menciptakan kota yang berkelanjutan. Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain menganalisis sejarah perkembangan fisik wilayah Kabupaten Bekasi, menganalisis kependudukan wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, menganalisis permasalahan lingkungan hidup kawasan perkotaan di Kabupaten Bekasi, dan menganalisis muatan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2020 terkait Lingkungan Hidup.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode campuran. Metode kuantitatif dilakukan untuk menganalisis peta perkembangan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Analisis peta guna lahan akan dilakukan melalui pemetaan dengan geospasial tahun 2000-2023 dan analisis kependudukan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi tahun 2020. Informasi geospasial merupakan aspek keruangan yang dapat menunjukkan, lokasi, bentuk, letak dan lokasi suatu objek yang berada di permukaan bumi dalam suatu sistem koordinat referensi tertentu (Bashit et al., 2020). Data geospasial dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti perencanaan, pengambilan keputusan, penanganan bencana dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan (Bashit et al., 2020). Adapun metode kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi, menganalisis muatan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2020 terkait Lingkungan Hidup dan menyusun konsep integrasi muatan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2020 terkait Lingkungan Hidup ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi melalui studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Mestika Zed, 2008). Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Kabupaten Bekasi. Adapun peta lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Perkembangan Wilayah Fisik Kabupaten Bekasi Tahun 2000-2023

Berdasarkan hasil analisis spasial perkembangan wilayah fisik Kabupaten Bekasi tahun 2000 hingga 2023 ditemukan adanya perkembangan yang cukup pesat. Pada tahun 2000, Kabupaten Bekasi dan Kota masih didominasi oleh lahan vegetasi dan lahan basah dengan luas lahan vegetasi sebesar 71.077 Ha dan lahan basah seluas 38.828 Ha, disusul oleh lahan area terbangun seluas 38.122 Ha, sedangkan luas badan air masih sangat minim, yakni seluas 411 Ha. Kemudian pada tahun 2005, terjadi penurunan luas lahan vegetasi yang cukup signifikan menjadi seluas 55.226 Ha dan ditemukan adanya perluasan badan air yang cukup signifikan menjadi seluas 24.533 Ha. Adapun lahan terbangun mengalami peningkatan luas, namun tidak signifikan dengan luas lahan terbangun seluas 29.007 Ha. Begitu pula pada tahun 2010, tidak ada perkembangan yang signifikan dari segi luas lahan terbangun, lahan vegetasi, lahan basah dan badan air. Kemudian, pada tahun 2015 terlihat adanya perkembangan yang cukup signifikan dengan adanya peningkatan luas lahan terbangun dan berkurangnya luas lahan vegetasi di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi dengan luas lahan terbangun seluas 59.990 Ha dan luas vegetasi seluas 35.067 Ha. Luas lahan area terbangun terus mengalami perkembangan hingga tahun 2023, di mana Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi sudah didominasi oleh lahan area terbangun dengan luas lahan terbangun sebesar 82.411 Ha.

Tabel 1. Luasan tutupan lahan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi

Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Tahun
Area Terbangun	221,135	2005
Badan Air	90,336	2010
Vegetasi	184,912	2015
Lahan Bersih	97,369	2023

Berdasarkan hasil analisis spasial perkembangan wilayah fisik pada tahun 2023, ditemukan berkurangnya jumlah vegetasi pada Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, terutama pada Kota Bekasi yang sudah didominasi oleh area terbangun. Hal ini tercermin dari persentase ruang terbuka hijau di Kota Bekasi, dimana berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didapati jumlah ruang terbuka hijau di Kota Bekasi pada tahun 2022 hanya sebesar 0,05% dari total luas area Kota Bekasi. Adapun jumlah presentasi ruang terbuka hijau di Kabupaten Bekasi baru mencapai 17% dari total luas area Kabupaten Bekasi. Jumlah ini masih jauh di bawah Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% private.

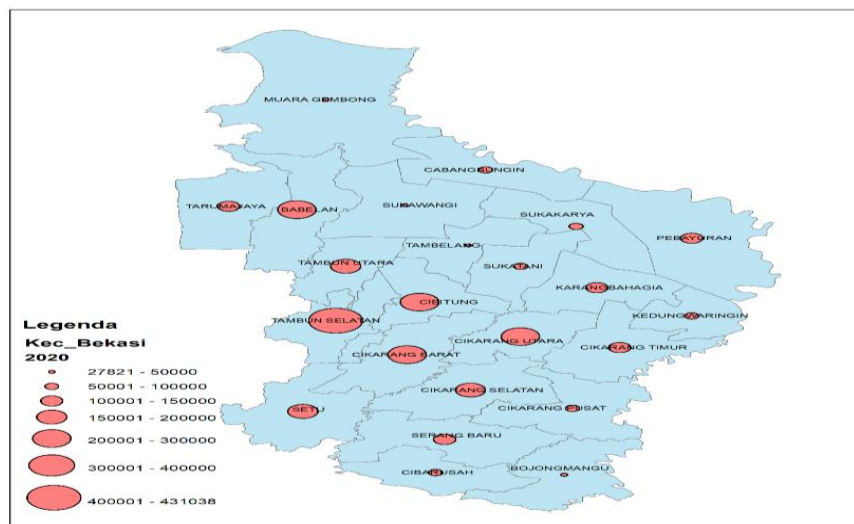
Meningkatnya luas area terbangun di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi mendorong meningkatnya aktivitas di wilayah tersebut, seperti aktivitas transportasi, perindustrian, dan lain sebagainya. Hal ini berdampak pada meningkatnya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut. Hal ini dapat berdampak pada terlampauinya daya tampung dan daya dukung di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Untuk itu, perlu dilakukan analisis kependudukan wilayah dan permasalahan lingkungan hidup yang ditimbulkan di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.

3.2 Analisis Kependudukan Wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi

Bekasi merupakan salah satu kota satelit Jakarta yang sangat padat penduduk. Populasinya terus bertambah pesat, sebagian besar karena migrasi. Pola kawasan terbangun di Kota Bekasi didominasi oleh area perumahan dan komersial. Kota Bekasi terus melakukan pembangunan infrastruktur untuk menampung pertumbuhan penduduknya

yang cepat sampai ke daerah sekitarnya (Kabupaten). Kabupaten Bekasi memiliki populasi yang beragam, dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, sebagian besar karena urbanisasi. Kepadatan penduduknya tinggi di beberapa area, terutama dekat zona industri dan permukiman. Wilayah ini memiliki kombinasi antara area industri, pertanian, dan permukiman. Ada pertumbuhan kawasan industri yang signifikan, terutama karena lokasinya yang strategis dekat dengan Jakarta. Interaksi yang erat terbangun antara Kabupaten dan Kota Bekasi, terutama dalam hal pergerakan penduduk dan ekonomi. Banyak penduduk Kabupaten Bekasi bekerja atau bersekolah di Kota Bekasi dan sebaliknya. Kedua wilayah menghadapi tantangan dalam mengelola pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, termasuk masalah lingkungan, kepadatan lalu lintas, dan penyediaan layanan publik yang memadai.

Berdasarkan Permendagri no. 57 tahun 2010, kota dikategorikan sebagai kota kecil dengan jumlah penduduk 100.000 jiwa, kota sedang sejumlah 100.000-500.000 jiwa, dan kota besar merupakan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa. Pada peta jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi, terlihat bahwa Kecamatan Cikarang Barat, Cikarang Utara, dan Kecamatan Cibitung memiliki jumlah penduduk berturut-turut 205.333, 228.937, dan 242.557. Ketiga Kecamatan tersebut masuk dalam kategori Kota dengan kepadatan sedang. Menariknya, Kecamatan Tambun selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 431.038 jiwa, jumlah tersebut hampir mencapai batas atas kota dengan kepadatan sedang. Pertumbuhan penduduk per tahun dari tahun 2002 ke tahun 2020 adalah sekitar 3.03% per tahun. Sehingga, pada masa depan, Kecamatan Tambun punya potensi menjadi Kota dengan kategori besar. Hal ini diperkuat dengan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, mengingat pada tahun 2002 jumlah penduduk Kecamatan Tambun Selatan telah mencapai 278.161 jiwa. Hasil analisis peta analisis kependudukan wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi tahun 2020 pada gambar 2.



Gambar 2. Peta analisis kependudukan wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi tahun 2020

3.3 Analisis Permasalahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bekasi

Berdasarkan hasil analisis peta pengembangan wilayah Bekasi, terjadi alih fungsi lahan dari sektor pertanian ke sektor perindustrian, perdagangan dan jasa, perubahan tata guna lahan akibat pembangunan kawasan. Perkembangan Kabupaten Bekasi mendorong beberapa permasalahan lingkungan selama beberapa tahun terakhir. Beberapa permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Bekasi selama tahun 2000-2020, di antaranya:

a. Meningkatnya kejadian banjir pada tahun 2018-2020

Kabupaten Bekasi adalah salah satu daerah Indonesia yang mengalami peningkatan kejadian banjir pada periode tahun 2018-2020. Pada tahun 2018,

jumlah desa/kelurahan yang mengalami banjir sebanyak 53 wilayah. Pada tahun 2019, menurun menjadi 32 wilayah. Namun, pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 104 wilayah (Pangestika et al., 2022). Secara topografi dan kemiringan wilayah, Kabupaten Bekasi adalah daerah hilir yang memiliki risiko besar terhadap banjir akibat luapan sungai ketika musim hujan tiba. Banjir bandang (flash flooding) adalah permasalahan utama yang dialami oleh masyarakat yang tinggal di daerah hilir bagian Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS). Permasalahan banjir di wilayah Kabupaten Bekasi pada periode tersebut pun disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang bermukim baik termasuk dari peningkatan urbanisasi. Pertambahan jumlah penduduk selalu diikuti oleh perkembangan infrastruktur di wilayah tersebut, seperti perumahan, sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, hingga pasokan air bersih. Di samping itu, peningkatan volume limbah yang dihasilkan menimbulkan permasalahan tersendiri pada sistem drainase. Hilangnya area resapan air akibat ekspansi pemukiman dan drainase yang tersebut menyebabkan semakin meluasnya genangan banjir di Kabupaten Bekasi.

- b. Meningkatnya pencemaran limbah industri akibat meningkatnya area perindustrian di sekitar wilayah Kabupaten Bekasi

Permasalahan lingkungan di Kabupaten Bekasi yang perlu menjadi perhatian adalah kasus pencemaran akibat limbah industri yang tidak dikelola. Pada umumnya, limbah industri mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan serta kelangsungan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pembangunan industri yang semakin bertambah di Kabupaten Bekasi berimplikasi pada risiko kerusakan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjadi penting sebagai landasan hukum yang mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Dengan adanya Amdal, dapat secara efektif mengelola dampak negatif dari kegiatan industri terhadap lingkungan, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi ekosistem dan komunitas masyarakat di Kabupaten Bekasi.

- c. Menurunnya kualitas udara akibat polusi kendaraan dan bahan bakar industri

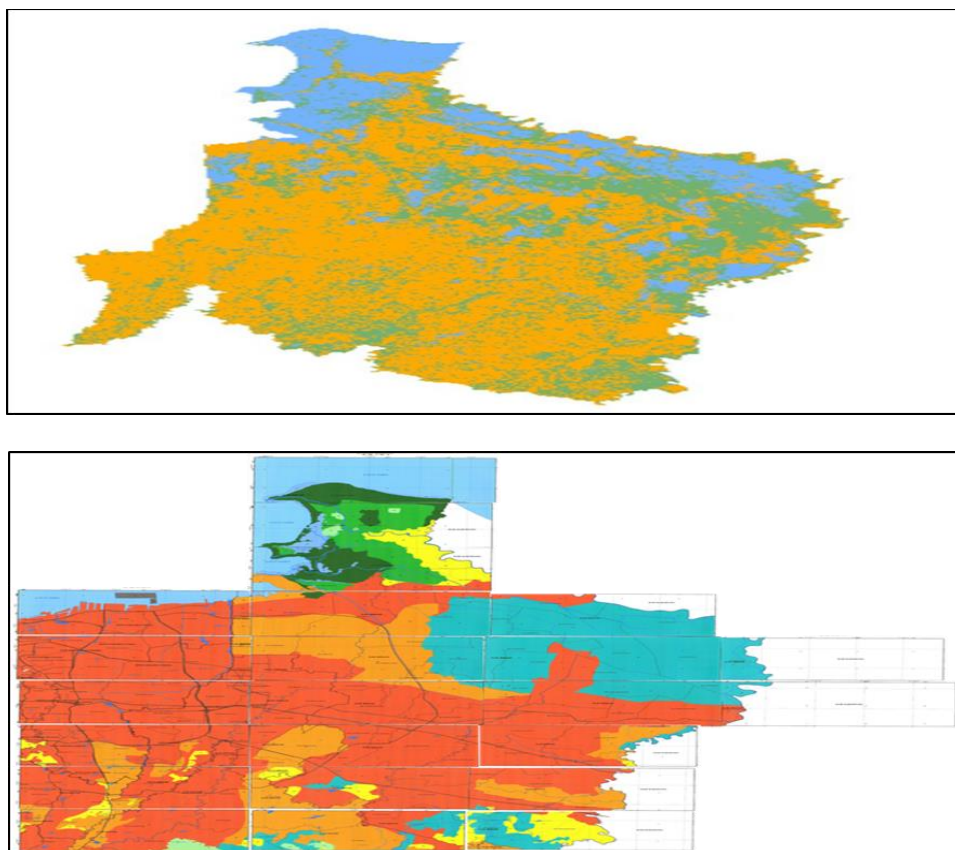
Perkembangan Kabupaten Bekasi mendorong meningkatnya aktivitas manusia di Kabupaten Bekasi seperti peningkatan penggunaan kendaraan bermotor dan meningkatnya aktivitas industri. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas udara di Kabupaten Bekasi yang disebabkan oleh polusi kendaraan bermotor dan polusi bahan bakar industri. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Aprilana dan Faesyari, 2023, didapati bahwa pada tahun 2018, kualitas udara pada sebagian kecamatan di Kabupaten Bekasi masuk ke dalam kategori waspada dan sangat kurang yang kemudian terjadi peningkatan kualitas udara buruk di Kabupaten Bekasi pada 2019, dengan kategori waspada tingkat tinggi. Kecamatan-kecamatan yang masuk ke dalam kategori waspada adalah kecamatan dengan kawasan industri dan aktivitas manusia seperti pasar, perkantoran dan transportasi. Berdasarkan analisis permasalahan lingkungan hidup yang dialami Kabupaten Bekasi, perlu adanya peninjauan lebih lanjut terkait dengan daya dukung dan daya tampung wilayah Kabupaten Bekasi. Perlu adanya upaya peningkatan daya tampung wilayah Kabupaten Bekasi melalui pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Analisis daya dukung dan daya tampung wilayah Kabupaten Bekasi perlu dimuat dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bekasi dengan menyesuaikan strategi perencanaan tata ruang wilayah yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 untuk membangun wilayah Kabupaten Bekasi yang lebih berkelanjutan. Analisis perkembangan wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 60 Tahun 2020 untuk melihat kesesuaian kondisi Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi saat ini dengan Perpres Nomor 60 Tahun 2020.

3.4 Analisis Perkembangan Wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020

Secara garis besar Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 yang memuat tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur atau disebut juga disebut kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Kawasan Perkotaan Bekasi memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional dan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Penataan ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagai Kawasan Perkotaan yang merupakan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan. Berikut ini adalah Analisa kesesuaian antara rencana tata ruang yang sudah dimuat di Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 untuk perkembangan wilayah Kabupaten Bekasi. Analisa dijelaskan pada Gambar 4.2 tentang peta hasil analisis spasial Kabupaten Bekasi tahun 2023 yang dibandingkan dengan peta pemanfaatan lahan berdasarkan Perpres No 60 Tahun 2020. Terdapat 3 hal yang menonjol yaitu rencana tata ruang wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi pada zona L1, B3 dan B5 yang akan dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 3. (a) Peta hasil analisis spasial Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Tahun 2023 dan (b) Peta pemanfaatan lahan berdasarkan Perpres No 60 Tahun 2020

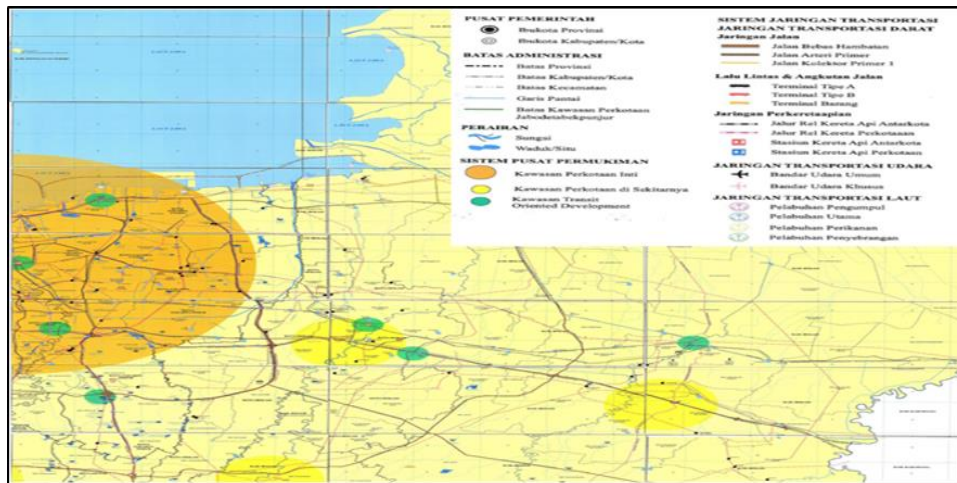
Pada peta terlihat Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan, dan Kecamatan Muaragembong di tahun 2023 merupakan lahan basah didominasi oleh pertanian dan lahan tambak, sedangkan pada Perpes No 60 Tahun 2020 seharusnya wilayah tersebut merupakan Kawasan Hutan lindung. Selain itu, Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Cabangbungin, Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Serangbaru, dan Kecamatan Setu pada peta tahun 2023 yang menjadi area terbangun dan lahan basah seharusnya wilayah tersebut merupakan Zona B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan sedang hingga rendah, tingkat pelayanan prasarana dan sarana rendah, dan merupakan kawasan potensial resapan air.

Zona B3 ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan peruntukan permukiman dengan kepadatan sedang hingga rendah, kawasan peruntukan agroindustri, kawasan peruntukan pariwisata dan kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara. Hal yang sangat menonjol juga ditunjukkan pada Kecamatan Bojongmangu, Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Pebayuran, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Setu, Cabangbungin, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Karang Bahagia, Kecamatan Kedung Waringin, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Tambelang, dan Kecamatan Tambun Utara yang direncanakan pada Perpes No 60 Tahun 2020 sebagai zona B5 yaitu zona yang memiliki kesesuaian lingkungan untuk budi daya pertanian.

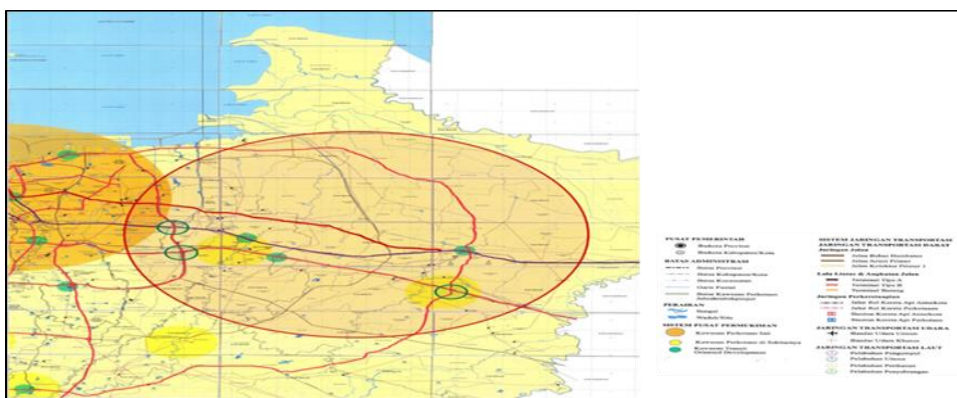
Sedangkan pada peta tahun 2023 zona tersebut digunakan sebagai area terbangun, vegetasi dan lahan basah. Di samping itu rencana tata ruang sudah dilaksanakan sebaik mungkin dengan area terbangun yang ada di Kecamatan Bantar Gebang, Jati Asih, Jati Sampurna, Mustika Jaya, dan Pondok Melati pada Kota Bekasi. Sedangkan di Kabupaten Bekasi pada Kecamatan Tarumajaya, Babelan, Setu, Sukatani, Sukawangi, Cabangbungin, Bojongmangu, Cibarusah, Cikarang Selatan, Kecamatan Cikarang Timur, Cikarang Pusat, Kedungwaringin, Muara Gembong, Kecamatan Serang Baru, Tambun Selatan, dan Kecamatan Tambun.

Kawasan tersebut sesuai dengan Perpres No 60 Tahun 2020 merupakan permukiman teratur kepadatan sedang, namun pada kenyataannya kepadatan penduduk di Kota Bekasi mencapai 24.260.178 jiwa dan Kabupaten Bekasi mencapai 26.938.828 jiwa. Berdasarkan Perpres 60 tahun 2020 pasal 35 bahwa perkembangan infrastruktur jalur kereta api dan TOD di Kota dan Kabupaten Bekasi bertujuan untuk mengintegrasikan antarjaringan angkutan umum massal, pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

Beberapa titik TOD ini sudah terbangun dengan baik, akan tetapi jumlah infrastruktur tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat yang mencapai 24 Juta Jiwa. Berikut ini pada gambar 4.3 terdapat beberapa titik yang direncanakan sebagai TOD pada Perpes No 60 Tahun 2020. Pada gambar 4.4 yang berfokus pada Kawasan TOD Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi sudah ada 3 titik TOD yang terletak pada Bekasi Selatan, Bekasi Timur dan Cikarang. Terdapat 3 titik alternatif tambahan TOD yang diajukan pada analisis peta ini yaitu di Cikarang Selatan dan 2 titik di Kota Bekasi.



Gambar 4. Peta infrastruktur transportasi di Kota dan Kabupaten Bekasi



Gambar 5. Peta analisis alternatif penambahan TOD

Di samping analisis peta spasial Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi dan transit oriented development, analisis implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2020 terhadap pengendalian pencemaran lingkungan hidup telah dilakukan. Meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi telah berdampak pada berbagai permasalahan lingkungan hidup di wilayah tersebut. Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti aktivitas industri yang menyebabkan meningkatnya pencemaran limbah pada lingkungan perairan serta menurunnya kualitas udara yang disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor dan emisi bahan bakar industri ke udara. Hal ini dapat berpotensi terhadap terlampauinya daya tampung dan daya dukung wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota harus disusun dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Analisis daya tampung dan daya dukung wilayah perlu dipertimbangkan ke dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Pengadaan fasilitas sarana dan prasarana seperti disebutkan dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 dalam rangka pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup diperlukan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Hal ini juga diperlukan dalam rangka pemenuhan standar layanan minimum perkotaan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 34 ayat (4) UUPR yang menyatakan bahwa pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, standar kualitas lingkungan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Strategi pengendalian pencemaran lingkungan hidup telah tercantum dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 dan perlu diterapkan dalam perencanaan tata ruang wilayah untuk

mengatasi permasalahan lingkungan hidup Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi seperti permasalahan banjir dan pencemaran limbah. Pada Perpres Nomor 60 Tahun 2020 telah tercantum strategi pengendalian banjir melalui pemanfaatan situ, danau, embung, atau waduk. Strategi lain yang telah tercantum dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 untuk mengendalikan banjir, antara lain; (1) sistem pengendalian banjir dan rob berupa kanal, (2) sistem pengendalian banjir dan rob berupa kolam retensi ditetapkan di kawasan dataran tinggi yang dilalui arus banjir di kawasan pesisir, (3) Sistem pengendalian banjir pada sungai, (4) Sistem pengendalian banjir dan rob berupa tanggul pantai, dan (5) Sistem pengendalian banjir dan rob berupa jaringan drainase. Strategi pengendalian pencemaran limbah telah tercantum dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 melalui pengadaan sistem jaringan air limbah jaringan air limbah meliputi sistem pembuangan air limbah domestik dan sistem pengelolaan air limbah industri yang dimaksudkan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan penataan ruang di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah. Hal ini diperlukan untuk memenuhi standar pelayanan minimum perkotaan. Analisis daya dukung dan daya tampung wilayah dan implementasi strategi perencanaan penataan ruang pada Perpres Nomor 60 Tahun 2020 diperlukan mengurangi permasalahan lingkungan hidup Kabupaten Bekasi serta menciptakan wilayah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi yang lebih berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Perencanaan penataan ruang di Kabupaten dan Kota Bekasi telah dirumuskan dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020, berdasarkan analisis spasial yang telah dilakukan dari tahun 2000 hingga tahun 2023 ditemukan perubahan tutupan lahan yang signifikan. Hal ini berkorelasi dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas manusia di wilayah tersebut. Hasil analisis keruangan menunjukkan bahwa untuk mengimplementasikan Perpres No 60 Tahun 2020 dibutuhkan integrasi penataan ruang, evaluasi penggunaan lahan, dan sinergi antara kawasan lindung, kawasan budidaya, dan sistem pusat permukiman (kawasan kota inti, kawasan perkotaan di sekitarnya, dan kawasan transit oriented development).

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim IASSSF karena telah mendukung penulisan penelitian ini.

Kontribusi Penulis

Semua penulis berkontribusi penuh atas penulisan artikel ini.

Pendanaan

Penelitian ini tidak mendapat sumber dana dari manapun.

Pernyataan Dewan Peninjau Etis

Tidak berlaku.

Pernyataan Persetujuan yang Diinformasikan

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak berlaku.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Akses Terbuka

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi International Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media dalam format apapun. Selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke Lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam Lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam Lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin untuk langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat lisensi ini kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Referensi

- Alfarizi, C. P., Subiyanto, S., & Amarrohman, F. J. (2015). Analisis Arah Pertumbuhan Wilayah Dengan Menggunakan Metode Sig (Studi Kasus : Kabupaten Bekasi). In *Jurnal Geodesi Undip OKTOBER* (Vol. 4). <https://doi.org/10.14710/jgundip.2015.9936>
- Aprilana dan Faesyari, Enurmas Zaetun. (2023). Visualisasi Kualitas Udara Berdasarkan Parameter So2 Dan No2 Pada Kawasan Terbangun Di Kabupaten Bekasi. <https://eproceeding.itenas.ac.id/index.php/ftsp/article/view/1847>
- Bashit, N., Susanti, S., Ariany, Z., & Syakur, A. (2020). Pelatihan Penggunaan Software Quantumgis Untuk Peningkatan Kualitas Data Geospasial Desa Karanganyar (Vol. 2, Issue 3). <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pasopati>
- Benton-Short, L., Keeley, M., & Rowland, J. (2019). Green infrastructure, green space, and sustainable urbanism: geography's important role. *Urban Geography*, 40(3), 330–351. <https://doi.org/10.1080/02723638.2017.1360105>
- Bolund, P., & Hunhammar, S. (1999). Ecosystem services in urban areas. In *Ecological Economics* (Vol. 29). [https://doi.org/10.1016/S0921-8009\(99\)00013-0](https://doi.org/10.1016/S0921-8009(99)00013-0)
- BP4RTD SIL Universitas Indonesia. (2021). 1 BP4RTD S2 SIL 2021 Versi 30092021 ISBN. <https://sil.ui.ac.id/>
- Commission on Environment, W. (n.d.). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future Towards Sustainable Development 2. Part II. Common Challenges Population and Human Resources 4. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>
- Endlicher, W., Langner, M., Hesse, M., Mieg, H. A., Kowarik, I., Hostert, P., Kulke, E., Nützmann, G., Schulz, M., Van Der Meer, E., Wessolek, G., & Wiegand, C. (2011). Urban Ecology-Definitions And Concepts. <https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/publications/urban-ecology-definitions-and-concepts>
- Ervianto, W. I. (2018). Kajian Tentang Kota Berkelanjutan Di Indonesia (Studi Kasus Kota Yogyakarta). 16, 60–65. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jmts/article/view/4995>
- G. Tyler Miller, & Scott E. Spoolman. (2016). Living in the Environment. www.cengage.com
- IGN Wahyu Dwi Payana. (2016, October 10). Daya Dukung Lingkungan Hidup. Wikibuku. https://id.wikibooks.org/wiki/Daya_Dukung_Lingkungan_Hidup

- Maya, J. (2019). Dari Kota Administratif Hingga Menjadi Kota Otonom (Perkembangan Kota Bekasi Tahun 1982-2004). <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/4224/1/Jennifer%20Maya.pdf>
- Mestika Zed. (2008). Metode penelitian kepustakaan (2nd ed.). <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Nurhidayani, A. F., Osly, P. J., & Ihsani, I. (2019). Hubungan Aksesibilitas Terhadap Tingkat Perkembangan Wilayah Desa Di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. *Jurnal Infrastruktur*, 4(2). <https://doi.org/10.35814/Infrastruktur.V4i2.698>
- Pangestika, R., Wilti, I. R., Zainal, A. U., & Dahlia, S. (2022). Persepsi Masyarakat Tentang Risiko Penyakit Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Banjir Di Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi. *Jurnal Kesehatan Lingkungan: Jurnal Dan Aplikasi Teknik Kesehatan Lingkungan*, 19(1), 91-98. <https://doi.org/10.31964/jkl.v19i1.455>
- Presiden RI. (2009). UU Nomor 32 Tahun 2009. [https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf)
- Pravitasari, A. E., Saizen, I., Tsutsumida, N., Rustiadi, E., & Pribadi, D. O. (2015). Local Spatially Dependent Driving Forces of Urban Expansion in an Emerging Asian Megacity: the Case of Greater Jakarta (Jabodetabek). *Journal of Sustainable Development*, 8(1), 108-119. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/75532>
- Prihatin, R. B. (2015). Alih Fungsi Lahan di Perkotaan (Studi Kasus di Kota Bandung dan Yogyakarta). *Jurnal Aspirasi*, 6(2), 105-118. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.507>
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2011). Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, 58-114. Yayasan Pustaka Obor.
- Tambunan, R. P. (2023). Metode Daya Dukung Lingkungan Wilayah.
- UN-HABITAT. (2022). Envisaging the Future of Cities. https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/06/wcr_2022.pdf
- Widyaningsih, N. S. (2001). Relevansi Prefensi Penduduk terhadap Fasilitas Kota yang Mempengaruhi Faktor Perkembangan Kota. *Plannit Journal* No. 2 Th I, 33. https://repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2108200005/22117114_9_034434.pdf
- Wicaksono, T., Sugiyanto, F. X., & Sugiyanto, F. X. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Perumahan Untuk Tujuan Komersial Di Kawasan Tlogosari Kulon, Semarang (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro). <http://eprints.undip.ac.id/27893/>
- Yunus, H. S. (2015). Manajemen kota perspektif spasial. Pustaka Pelajar. <https://onsearch.id/Record/IOS3.NADAR-0312000000420>

Biografi Penulis

AZIZ KURNIAWAN, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email:
- ORCID:
- Web of Science ResearcherID:
- Scopus Author ID:
- Homepage:

CANTIKA LIVIONA, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email:
- ORCID:
- Web of Science ResearcherID:
- Scopus Author ID:
- Homepage:

MUFLIHATUN NAHRIYAH, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email:
- ORCID:
- Web of Science ResearcherID:
- Scopus Author ID:
- Homepage:

NIKO ABDILLAH, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email: niko.abdillah@gmail.com
- ORCID:
- Web of Science ResearcherID:
- Scopus Author ID:
- Homepage:

OKTA LIAN ATIKAH, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email:
- ORCID:
- Web of Science ResearcherID:
- Scopus Author ID:
- Homepage:

RISANTI DELPHIA, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email:
- ORCID:
- Web of Science ResearcherID:
- Scopus Author ID:
- Homepage:

YUDI NUGRAHA SAKTI, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia.

- Email:
- ORCID:
- Web of Science ResearcherID:
- Scopus Author ID:
- Homepage: